

Ribuan Driver Ojol Geruduk Kantor Gubernur

Dari Halaman 1

payung hukum Ojol, penghapusan program instan aplikasi (Aceng, Slot, Bike Hemat, HUB, Samday, Gabungan, dan lainnya) yang merugikan para driver. Kemudian meninjau potongan aplikasi berdasarkan Permenhub Nomor 667 tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor, serta memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan kerja.

Disambut Bobby

Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut menerima langsung aksi para pendemo. Bobby pun berdiri di atas mobil orator, kemudian menyapa dan menanyakan tuntutan para driver, yang mengenakan seragam kemitraan transportasi online.

Usai mendengarkan beberapa tuntutan para driver Ojol, Bobby berjanji akan segera memperlajarnya. Apa-apa yang bisa ditindaklanjuti Pemprov dan apa yang perlu disampaikan ke Pemerintah Pusat.

"Tadi ada empat tuntutan. Pertama, payung

hukum Ojol tingkat nasional dan provinsi. Saya janji akan mempelajari, kalau bisa akan saya buat Pergub-nya. Kalau bisa diusulkan ke Perda, kita bicarakan dengan legislatif. Tentu payung hukum secara nasional akan kami sampaikan. Dari Provinsi Sumut akan memberikan surat kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, untuk menyampaikan suara teman-teman Ojol, aplikasi, sehingga bisa mewakili semuanya," lanjut Bobby.

Tuntutan selanjutnya adalah memberikan perlindungan dan keselamatan kepada para driver ojek online. Menurut Bobby, memberikan perlindungan dan keselamatan bagi driver online sangat penting.

Pemerintah, lanjut Bobby, terus berusaha untuk mengcover masyarakat agar mendapat perlindungan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, baik tenaga kerja formal dan informal.

"Saya sangat setuju aplikasi menyiapkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita

minta seluruh driver ditanggung BPJS-nya oleh aplikasi," pinta Bobby, ke sejumlah aplikasi driver online, yang juga hadir dalam unjuk rasa tersebut.

Menurut Bobby, para driver tersebut sudah layak mendapatkan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan, lantaran mereka mencari nafkah, sementara keluarga yang di rumah perlu ketenangan. "Jangan sampai nanti ada lagi keluarga-keluarga kita masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem, gara-gara yang cari nafkahnya berhalangan. Apakah kecelakaan, hingga tak bisa mencari nafkah. Minimal biaya kesehatannya terjamin," kata Bobby.

Dari empat tuntutan yang diajukan para driver online tersebut, Bobby berharap ada yang dikabulkan oleh aplikasi. Seperti jaminan perlindungan dan kesehatan.

"Saya sebagai Gubernur Sumut minta satu saja Pak dari empat tuntutan, bisa Pak?" tanya Bobby ke sejumlah aplikasi yang turut serta menghampiri para demonstran.

Bobby memberi waktu dua minggu bagi para aplikasi, untuk berkoordinasi dengan pimpinannya, guna menahuti tuntutan para pengunjukrasa. Selanjutnya akan dijadwalkan pertemuan bersama driver dan aplikasi, terkait solusi terbaik atas tuntutan para driver Ojol.

Perwakilan pimpinan aplikasi Fadil Pasaribu menyampaikan, pihaknya selalu membuka ruang diskusi untuk para mitra, termasuk payung hukum apa yang ditetapkan pemerintah. Terkait komisi, pihaknya mengikuti peraturan pemerintah bahwa tidak lebih dari 20%.

"Kita selalu terbuka, hitungannya sebenarnya sudah bisa dilihat dari notifikasi. Aspirasi dari teman-teman bisa ditampung dan membuka ruang diskusi," katanya.

Begitupula dengan perwakilan pimpinan aplikasi driver online lainnya, yang menyebutkan bahwa tuntutan dan aspirasi dari para pendemo akan disampaikan ke pusat.

Mereka beralasan tidak bisa memutuskan kebijakan yang merupakan wewenang dari pusat. Mereka pun meminta waktu dua Minggu untuk menindaklanjuti apa saja yang menjadi tuntutan para pendemo.

Sementara Koordinator Aksi Agam Zubir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sumut yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah para driver online, yang melakukan unjuk rasa. Aksi damai ini dilakukan secara nasional, termasuk di Sumut.

"Pemerintah harus hadir dan mengintervensi, jangan ada lagi pembiaran seperti saat ini," ucapnya.(R)

Kader PSI Diperiksa Polisi

Dari Halaman 1

menyebarkan dokumen berupa ijazah milik seseorang tanpa izin pemilik.

Dian dilaporkan oleh salah satu dosen dari Universitas Sumatera Utara (USU) berinisial YLH. Dalam laporan yang diterima detikBali, Dian Sandi dilaporkan melanggar Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2008.

Dalam laporan yang diajukan YLH, Dian Sandi dinilai membuat kegaduhan di media sosial karena unggahan foto ijazah Jokowi di laman X. YLH melaporkan Dian pada 24 April 2025.

Kasus tuduhan ijazah bermula saat Jokowi selaku atapor melihat video yang berisi dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap dirinya.

"Kronologis perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban," kata Ade Ary kepada wartawan, Kamis (15/5).

Selanjutnya, Jokowi meminta kepada aduan dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial.

"Dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan di antaranya oleh yang pertama RHS yang kedua RSN yang ketiga TT yang keempat ES dan yang kelima KTR," tutur Ade Ary.

Namun, lantaran merasa dirugikan Jokowi akh-

irnya menempuh langkah hukum dengan membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada 30 April.

Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.

Terkait laporan itu, polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti yang diserahkan ke kepolisian saat Jokowi dan tim kuasa hukum membuat laporan.

"Beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyidik antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video youtube dan konten pada media sosial X," kata Ade Ary.

"Kemudian ada beberapa dokumen, fotokopi ijazah. Kemudian ada print out legalisir dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan," imbuhnya.(cnni/js)

Jokowi Diperiksa Bareskrim

Dari Halaman 1

singkat, Selasa (20/5). Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro turut mengonfirmasi pemeriksaan Jokowi hari ini.

"Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10.00 WIB hadir di Bareskrim," ujar Djuhandhani.

Sebelumnya Jokowi telah menyerahkan

ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan uji Laboratorium Forensik.

Penyerahan ijazah itu dilakukan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, pada Jumat (9/5).

"Hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji Laboratorium Forensik," ujar Yakup kepada wartawan di Bareskrim Polri.

Dalam kasus ini Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani

Rahardjo Puro mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.

Aduan itu dilayangkan oleh Ketua TPUA Egi Sudjana pada 9 Desember 2024 dan diterima sebagai Laporan Informasi dengan Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Direktorat Tindak Pidana Umum pada 9 April 2025.

"Perihal pengaduan adanya temuan publik (dan dari berbagai media sosial sebagai bentuk notoire feiten) cacat hukum ijazah S1 Jokowi oleh Tim Pembela Ulama & Aktivistis," jelasnya. (cnni/js)

Pegawai Kemnaker Diduga Peras Calon TKA

Dari Halaman 1

gratifikasi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan tim penyidik pada hari ini menggeledah Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, untuk mencari bukti-bukti terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

"Di mana oknum Kemnaker pada Ditjen Binapenta memungut atau memaksa seseorang memberikan sesuatu (Pasal 12e UU Tipikor) dan

atau menerima gratifikasi (Pasal 12 B) terhadap para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," ujar Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (20/5).

Asep menuturkan KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, namun belum bisa menyampaikan detail identitasnya.

"(Tempus kasus atau terjadinya dugaan korupsi ini) periode 2020 sampai dengan 2023," kata Asep. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kami sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kemnaker," kata Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sunardi Manampiar Sinaga. (cnni/js)

280 Ribu Buruh Diprediksi Terkena PHK

Dari Halaman 1

atkan sepanjang 2024 ada 77.960 korban PHK. Sedangkan hingga April 2025, jumlah korban PHK telah mencapai 24.360 pekerja.

Karenanya, dewas mendorong direksi BPJS Ketenagakerjaan mengkaji dampak tingginya korban PHK pada strategi peningkatan kepesertaan serta asumsi penyusunan target kepesertaan,

keuangan, dan investasi dalam perencanaan strategis. Dewas terutama meminta direksi belajar dari kasus PHK massal PT Sri Rejeki Isman (Sritex) hingga PT Danbi International.

Zuhri mengatakan, jumlah kasus klaim Sritex Group mencapai 9.893 orang dengan nilai klaim mencapai Rp223,9 miliar. Sedangkan untuk PT Dambi Internasional, jumlah kasus klaimnya 2.077 orang dengan nilai klaim sekitar Rp44 miliar.

"Sehingga dari pembelajaran ini, kami sentiasa memberikan masukan dan mendorong direksi untuk terus memberikan pelayanan terbaik, terutama untuk kondisi terjadinya PHK massal dengan semestinya," katanya.

Kemnaker mencatat korban PHK mencapai 24.036 orang pada periode 1 Januari hingga 23 April 2025. Tiga daerah dengan jumlah PHK terbanyak yaitu Jawa Tengah (10.692 orang), Jakarta (4.649 orang), dan Riau (3.546 orang). (cnni/js)

Prabowo Tak Mau Koperasi Desa

Dari Halaman 1

semua itu urusannya dengan BUMN kita," ujar Zulhas di Kantornya usai rapat bersama Erick dan pejabat BUMN, Senin (19/5).

Zulhas sapaan akrabnya mengatakan agar koperasi desa itu nantinya sukses, pemerintah akan menggandeng BUMN.

Peran BUMN katanya adalah kunci keberhasilan KopDes Merah Putih. Ia mengatakan BUMN akan diminta membantu tidak hanya dari segi pendanaan tapi juga bisnis koperasi desa.

Peran BUMN itu diharapkan pemerintah karena perusahaan pelat merah memiliki unsur dan lini usaha yang lengkap.

Misalnya, Pertamina. Mereka bisa membantu

koperasi menjadi agen BBM dan LPG.

Selain Pertamina, ada juga Bulog dan ID Food. Mereka diharapkan bisa membantu koperasi desa menjadi agen sembako dan minyak goreng.

"Jadi memang hampir semua, oleh karena itu kata cucunya, keberpihakan BUMN kepada koperasi ini akan sangat menentukan ini berhasil apa tidak," terangnya.(cnni/js)

3 Sekutu AS Ancam Hukum Israel

Dari Halaman 1

kan menentang keras agresi militer Israel di Gaza hingga perluasan permukiman ilegal warganya di Tepi Barat, Palestina.

Melalui pernyataan bersama, ketiga negara

Eropa yang semula sempat berpihak ke Israel itu mewanti-wanti akan ada "respons tegas" jika Tel Aviv tidak segera menghentikan operasi militer terbarunya di Gaza dan telah menewaskan lebih dari 140 orang dalam beberapa hari terakhir ini.

"Jika Israel tidak segera menghentikan seran-

gan militer ofensifnya yang terbaru dan tak segera mencabut larangan akses untuk bantuan kemanusiaan, kami akan mengambil Langkah konkret sebagai respons," bunyi pernyataan bersama Prancis, Kanada, dan Inggris itu seperti dikutip Jerusalem Post pada Selasa (20/5). (cnni/js)

Inkubasi UMKM Syariah UIN SU

Dari Halaman 1

tinggi melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Salah satu langkah konkret untuk mewujudkan tujuan ini adalah dengan mendirikan Warung UMKM Syariah yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan usahanya.

Visi dan Misi Inkubasi UMKM Syariah
Visi dari inkubasi ini adalah menciptakan ekosistem bisnis syariah yang berkelanjutan di kalangan mahasiswa UIN SU Medan. Sementara misinya adalah:

1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa sejak dini.
2. Membantu mahasiswa dalam mendapatkan izin usaha, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT (Pengusaha Industri Rumah Tangga), sertifikat halal dari BPJPH, dan izin BPOM.

3. Mendorong mahasiswa untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

4. Membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah seperti BSI untuk mendukung pendanaan bisnis mahasiswa.

Peluang dan Tantangan

Dengan adanya program inkubasi ini, mahasiswa tidak hanya akan belajar teori bisnis, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam menjalankan usaha. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti kurangnya modal, keterbatasan pengetahuan tentang regulasi usaha, dan perlunya pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, UIN SU Medan perlu menjalin MoU dengan BPJPH untuk mendampingi mahasiswa dalam memperoleh sertifikat halal.

Langkah Implementasi

1. Pelatihan dan workshop kewirausahaan secara rutin.
 2. Pendirian Warung UMKM Syariah sebagai wadah pemasaran produk mahasiswa.
 3. Pendampingan untuk pengurusan izin usaha, termasuk NIB, PIRT, dan sertifikasi halal.
 4. Kolaborasi dengan BSI untuk penyediaan modal usaha.
 5. Promosi dan pemasaran melalui media sosial dan jaringan alumni.
- Harapan dan Dukungan**
Diharapkan program inkubasi ini akan mampu meningkatkan akreditasi kampus serta membuka peluang hibah untuk pengembangan usaha mahasiswa. Dengan dukungan penuh dari seluruh civitas akademika, UIN SU Medan diharapkan dapat mencetak generasi entrepreneur muda yang siap berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat. (*)



Indonesia Masa Depan Islam

Dari Halaman 1

dinamika keberagaman yang khas di Indonesia. Salah satu tokoh yang menyuarakan prediksi ini adalah Malek Bennabi, pemikir asal Aljazair, yang melihat bahwa "pusat gravitasi dunia Islam akan berpindah ke Timur." Di tengah krisis kepercayaan, konflik sektarian, dan stagnasi intelektual di banyak negara Muslim, Indonesia justru menunjukkan vitalitas dan semangat pembaruan yang segar. Dari penyelenggaraan dakwah yang moderat hingga diplomasi antarumat beragama, Indonesia seolah-olah menyodorkan wajah Islam yang ramah, merangkul, dan solutif di tengah dunia yang lelah dengan ekstremisme.

Mengapa Indonesia?
Jawabannya bukan hanya karena jumlah penduduk Muslim yang besar, melainkan karena watak keberislaman masyarakat Indonesia yang unik: inklusif, adaptif, dan berbasis budaya lokal. Sejak awal masuknya Islam ke Nusantara, dakwah tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan melalui pendekatan kultural, perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Model dakwah yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan tenggang rasa menghasilkan bentuk Islam yang kompatibel dengan demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga berperan besar dalam membentuk wajah Islam Indonesia yang moderat dan tercerahkan. NU dengan konsep "Islam Nusantara"-nya mendorong dakwah yang menghargai tradisi dan budaya lokal, sementara Muhammadiyah mendorong reformisme Islam melalui pendidikan dan pelayanan sosial. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat Muslim yang religius tetapi juga terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan modernitas.

Konstelasi inilah yang membuat dunia mulai memalingkan wajah ke Indonesia. Di saat sebagian negara Muslim terjebak dalam konflik internal dan ketegangan sektarian, Indonesia tampil sebagai oase perdamaian. Wajah Islam Indonesia menjadi rujukan: dari kerukunan antarumat beragama, pengembangan ekonomi syariah, hingga keaktifan dalam dialog lintas budaya di forum internasional.

Namun, harapan ini bukan tanpa tantangan.
Mimpi menjadikan Indonesia sebagai masa depan Islam menuntut kerja keras dan konsistensi. Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius, seperti munculnya gerakan intoleran, politisasi agama, ketimpangan akses pendidikan Islam berkualitas, serta tantangan digitalisasi dalam dakwah dan pemikiran keislaman. Kemunculan kelompok-kelompok radikal yang menajakan ide khilafah dan ujaran kebencian di ruang digital adalah ancaman nyata terhadap narasi Islam moderat.

Di sinilah peran generasi muda Muslim menjadi sangat krusial. Mereka harus menjadi lokomotif pembaruan pemikiran Islam yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar spiritualitas. Generasi muda Muslim hari ini memiliki peluang luar biasa: mereka hidup di era digital, memiliki akses pada khazanah keilmuan global, dan mampu menyuarakan aspirasi melalui berbagai platform media sosial.

Namun peluang ini hanya dapat dimaksimalkan jika mereka dibekali dengan tiga hal: 1. literasi keagamaan yang kuat dan kontekstual, 2. pemahaman kebangsaan yang kokoh, dan 3. keterampilan teknologi dan komunikasi yang mumpuni. Tanpa ketiganya, generasi muda hanya akan menjadi konsumen informasi keagamaan, bukan produsen gagasan Islam yang transformatif.

Selain itu, pemerintah dan tokoh-tokoh agama juga perlu bahu membahu menjaga keberagaman dan memperkuat moderasi beragama. Moderasi bukanlah bentuk pengebirian keyakinan, melainkan cara mengekspresikan iman secara dewasa, dialogis, dan tidak memaksakan kehendak. Dalam konteks ini, program moderasi beragama yang digungkan oleh Kementerian Agama harus terus digemakan, tetapi juga dikritisi dan diperkuat dari akar rumput.

Indonesia juga memiliki peluang besar dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar masa depan Islam. Dengan potensi industri halal, keuangan syariah, dan pariwisata halal, Indonesia bisa menjadi pemain utama di pasar global. Tapi keberhasilan ini bergantung pada inovasi, transparansi, dan integritas—bukan sekadar retorika politik.

Pada akhirnya, masa depan Islam bukanlah soal geografi semata, tetapi soal gagasan. Jika Indonesia ingin menjadi pusat peradaban Islam global, maka yang dibutuhkan bukan hanya populasi Muslim yang besar, tapi juga kualitas pemikiran, keadaban publik, dan keberanian untuk melakukan ijtihad dalam menjawab problem kekinian. Islam Indonesia harus menjadi Islam yang mencerahkan, bukan sekadar mengahfah masa lalu.

Kita punya warisan ulama besar, tradisi intelektual, dan semangat kebangsaan. Yang dibutuhkan kini adalah keberanian dan visi jauh ke depan. Jika dunia Islam pernah berjaya di Baghdad, Kairo, dan Andalusia, maka tak mustahil babak baru peradaban Islam akan lahir dari Jakarta, Yogyakarta, atau Pesantren-pesantren di pelosok Nusantara. Kita tidak sedang mengejar kejayaan semu, melainkan hendak menghidupkan kembali semangat Islam sebagai rahmat bagi semesta. Dan jika benar masa depan Islam ada di Indonesia, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali menyiapkan diri dengan kesungguhan, ilmu, dan akhlak mulia.